

## PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN SAMARINDA ULU

Candra Hermawan<sup>1</sup>, Masjaya<sup>2</sup>, Burhanudin<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir melalui sebuah Program Pengendalian banjir Dinas (PUPR), yang kemudian penulis melaksanakan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan Program Pengendalian banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta masyarakat sebagai key informan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis model interaktif dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Air serta masyarakat yang berada di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda berperan dalam Program pengendalian banjir dari hasil penelitian ini telah dapat di ketahui bahwa program Pengendalian banjir oleh Dinas PUPR telah berjalan dan terlaksana. Dari beberapa program pengendalian banjir hanya saja ada beberapa faktor sehingga belum bisa berjalan dengan efektif. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda masih terkendala keterkendalaan itu dari beberapa faktor anggaran yang ada setiap tahunnya serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk meminimalisir perencanaan lingkungan yang berdampak pada terjadinya banjir.*

**Kata Kunci:** *Peran, Dinas PUPR, Kota, Samarinda, pengendalian, banjir.*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Samarinda (2016: 53), luas kawasan banjir di Kota Samarinda mencapai 332,2

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hermawancandra@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

hektar. Selain itu, di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda, 2017: 40).

Banjir dapat terjadi karena meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya (Yulaelawati dan Usman dalam Nurrahmah, 2015: 16). Dalam perkembangannya kapasitas tampungan sungai dapat mengalami penurunan atau pengurangan yang disebabkan oleh erosi dan sedimentasi pada Daerah Aliran Sungai. Erosi dan sedimentasi pada Daerah Aliran Sungai akan mengurangi kapasitas sungai, sehingga timbul genangan dan banjir (Kodatie dan Sugiyanto, 2002: 78).

Oleh karena itu untuk dapat menindak lanjuti permasalahan banjir yang terjadi di Kota Samarinda maka dalam peraturan daerah walikota Samarinda (PERWALI) Nomor 25 tahun 2016 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Samarinda, merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian unsur pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan kota di bidang pekerjaan umum urusan bina marga dan pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional, program kegiatan pembangunan dan pengelolaan pengusaha, pengawasan dan pengendalian penetapan kebijakan, penyelesaian masalah operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir, pembinaan dan pemberdayaan sistem yang searah dengan kebijakan.

Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Kota Samarinda telah membuat program – program untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di daerah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu dengan membuat saluran drainase sebagai penanggulangan banjir di Perempatan lembuswana, selain itu juga beberapa program dari dinas pekerjaan umum seperti pembenahan dan peningkatan fungsi sistem drainase, maksud dari kegiatan ini adalah penataan/pembenahan sistem drainase yang ada dan peningkatan fungsi drainase dalam mengurangi daerah rawan banjir, Sasaran kegiatan ini adalah terciptanya sistem drainase Kota Samarinda yang benar dan memperlancar aliran di saluran drainase, sehingga luas genangan akibat hujan lokal dapat di persempit.

Namun dengan berbagai upaya pengendalian yang di lakukan oleh Pemerintah Kota dalam mengatasi masalah banjir, upaya tersebut berupa pembuatan saluran drainase, pembenahan sungai-sungai yang melintas kota, berbagai studi terkait pengendalian banjir kota, pembangunan sarana pengendalian banjir serta beberapa aturan telah di keluarkan untuk pengendalian banjir. Upaya-upaya tersebut ternyata kalah cepat dengan perkembangan kota, selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah

sembaranga, padahal seharusnya Pemerintah yang memiliki peran paling besar terhadap pembuatan kebijakan dalam hal ini masalah Pengendalian banjir. Pemerintah seharusnya bisa bersikap tegas dengan memberikan sanksi yang berat terhadap masyarakat yang tidak menjaga lingkungannya, oleh sebab itulah maka diperlukan suatu penataan terpadu pengendalian banjir dengan menyusun prioritas penanganan dan pembiayaan sesuai dengan kondisi actual prediksi pembangunan masa mendatang.

Sampai saat ini Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai beberapa titik yang sering sekali banjir apabila musim hujan turun, akibatnya yang ditimbulkan dari banjir tersebut yaitu lumpuhnya aktivitas prekonomian dan aktivitas transportasi kendaraan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota yang memiliki peran paling besar dalam mengatasi permasalahan banjir khususnya di Daerah Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu.

Oleh sebab itu maka pemerintah Kota Samarinda dalam upayanya untuk menjalankan peran dalam menanggulangi permasalahan banjir yang terjadi di daerah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu yang berpedoman pada peraturan walikota (PERWALI) Nomor 25 tahun 2016 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pengendalian bencana.

Hal ini yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu”. Selain ingin mengetahui program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengupayakan pengendalian banjir juga kendala kendala yang telah di hadapi selama mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Daerah Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulisan merasa terasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) dalam pengendalian banjir di kelurahan sidodadi kecamatan Samarinda Ulu.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

Konsep Peranan Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan atau *role* juga diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini, jika dikaitkan dengan pengertian peranan dalam pemerintahan daerah adalah tugas dan wewenang pemerintah kecamatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu agar pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus menjalankan peranannya. Hal ini senada

dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono (2002: 243). Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono (2002: 200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi 13 14 atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

### ***Pemerintahan***

Menurut Syafie (2013: 4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Ndraha (2003: 4-6) mendefinisikan pemerintahan sebagai sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Pelayanan publik dan pelayanan sipil tersebut wajib diproses oleh organ yang berwenang yang disebut sebagai pemerintah sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Kemudian menurut Makmur (2009: 166) pengertian pemerintahan memiliki dua arti, yaitu pengertian pemerintahan secara luas dan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit. Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan seluruh lembaga negara yang membidangi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi seluruh warga negaranya.

### ***Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah***

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Undang-undang ini juga menjelaskan definisi tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2)).

### ***Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)***

#### ***Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas (PUPR)***

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum. Dimana tujuannya sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan menunjang aktifitas, mengentaskan kemiskinan, penyebaran pembangunan, membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejaheraannya. Pergerakan pembangunan yang dinamis diharapkan dapat berperan ganda (*Double Acting*), disamping untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, membuka daerah yang tertinggal guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mengembangkan potensi ekonomi lokal (*Local economy devlopment*) juga membuka dan menciptakan lapangan kerja serta memperdayakan masyarakat dan swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan.

Program-program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti program pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian banjir, pembangunan gedung pemerintahan, peningkatan sarana prasarana kota, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pembangunan pondok pesantren/yayasan pendidikan, peningkatan sarana prasarana olah raga, pembangunan sarana prasarana kesehatan, peningkatan sarana prasarana kawasan khusus, pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan pembinaan dan pengawasan infrastruktur/jasa konstruksi, pengembang lingkungan sehat dan persampahan Kota Samarinda, perencanaan tata ruang pengendalian penataan bangunan diharapkan dapat mempercepat laju pemerataan pembangunan agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat baik yang berdiam di perkotaan maupun sampai di daerah plosok kelurahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Samarinda sebagai salah satu instansi/ unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya membantu walikota dalam bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum. Dimana tujuan agar sarana dan prasaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan menunjang aktifitas, kemiskinan, penyebaran pembangunan, membuka lapangan pkerjaan dan memperdayakan masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

### ***Pengendalian***

Hasibuan (2005:41) pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalm rencana. Menurut Harold dalam Hasibuan (2005:41) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2005:242) mengatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksana, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

### ***Banjir***

Banjir biasanya didefinisikan sebagai aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kerugian jiwa. Secara teknis, banjir adalah aliran sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampungan sungai, dengan demikian aliran sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah sekitarnya (Asdak dalam Dewi, 2010: 5).

Marfai dalam Kusumawara Dany (2017: 20) mendefinisikan bahwa banjir sebagai peristiwa terjadinya air yang mengenai daratan dan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada daratan tersebut serta dapat membuat kerugian sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar yang terkena banjir.

Banjir adalah debit aliran sungai yang relatif lebih besar dari biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga air limpasan tidak dapat ditampung oleh alur/palung sungai yang ada dan kemudian air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Tanika, 2016: 69).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat banjir didefinisikan sebagai aliran atau genangan air yang relatif lebih besar dari biasanya yang mengalir melampaui kapasitas tampungan sungai sehingga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada daratan tersebut serta dapat membuat kerugian sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar yang terkena banjir.

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini dikarenakan ada berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diantaranya adalah:

1. Mengingat judul dari tulisan ini adalah masalah peran serta fungsi dalam sebuah instansi pemerintah, maka dalam hal ini berarti membahas masalah yang berangkat dari sudut pandang sebuah instansi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang efektif serta efisien .
2. Merujuk pada fokus penelitian ini, bahwasannya sasaran penelitian dapat dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber informasi dan disamping itu juga penelitian ini penulis tidak bisa berbicara berdasarkan pada pengetahuan subjek yang diteliti.
3. Selain itu penelitian ini adalah mengungkap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dari suatu kegiatan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, guna dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam pengendalian banjir.
  - a. Program Pengendalian Banjir
  - b. Pelaksanaan Evaluasi Program Pengendalian Banjir
  - c. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam penanggulangan banjir di daerah Perempatan Lembuswana Kota Samarinda.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam pengendalian banjir***

##### *Program Pengendalian Banjir*

Indikator rencana program prioritas Kota Samarinda berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Adapun pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penyusunan Rencana Strategi Kegiatan , termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Berdasarkan perencanaan Program pengendalian banjir maka yang bertanggung jawab dalam program pengendalian banjir yang akan memaparkan selaku kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Ibu Desy Damayanti, ST, MT ,beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Yang bertanggung jawab dalam program pengendalian banjir di kelurahan sidodadi Samarinda Ulu adalah Pemerintah Kota Samarinda yang tupoksinya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda di Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (BPJSA).“ (Hasil wawancara, 27 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa yang bertanggung jawab dalam program pengendalian banjir adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dan untuk bidang yang melaksanakan program-program banjir yaitu di Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (BPJSA).

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapatkan prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pendanaan indikatif merupakan rancangan dalam APBD. Pendanaan indikatif dialokasikan ke setiap prgram prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visi, misi dan agenda prioritas maka dirumuskan strategi sebagai sarana untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda sebagai indikator suatu keberhasilan program yang akan di capai dalam sebuah perencanaan perlu sebuah pencapaian indikator keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Berdasarkan tabel Target Renstra 2017-2021, target rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dalam program pengendalian banjir menganggarkan dana sebesar Rp340.234.076.000 pada tahun pertama renstra 2017, kemudian pada tahun kedua meningkat sebesar Rp479.5000.000, pada tahun ketiga dibesarkan lagi menjadi Rp449.500.000, tahun keempat dan kelima anggaran dikecilkan dengan alasan finansial pengerjaan di perkirakan sudah berjalan lebih dari 70% yakni masing-masing Rp361.000.000 dan Rp236.000.000 pada dua tahun terakhir.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara mengenai pelaksanaan dari program banjir dengan Bpk Akhmad Supriyadi,ST, selaku Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Air ,beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan program banjir kami sudah melakukan semaksimal mungkin dan kami terus berupaya untuk mengatasi banjir di kelurahan sidodadi samarinda ulu dan kami berencana kedepan nya akan melakukan pendalaman lagi di polder vorvo dan Gg.indra sebagai resapan air di kelurahan sidodadi yang sekarang kedalamnya hanya 2 meter rencana kedepan nya akan melakukan pendalaman sekitar 10 atau 15 meter ini yang kami akan lakukan nanti sebagai mana polder tersebut berguna untuk mengurangi titik rawan banjir dan ini salah satu solusi sebagai resapan air

yang akan kami benahi dengan melakukan pendalaman lagi agar air yg terserap dalam polder dapat menampung lebih banyak lagi.” (Hasil wawancara, 27 Oktober 2018)

Dari wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pelaksanaan program banjir yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Kota Samarinda terus berupaya dalam mengatasi banjir rencana kedepan nya yang akan di lakukan yaitu melakukan pendalaman di polder vorvo dan Gg.indra yang sebagai resapan air yang ada di Kelurahan sidodadi dan rencana akan melakukan pendalaman sekitar 10 sampai 15 meter agar air tertampung dapat lebih banyak dan dapat mengurangi banjir.

Berdasarkan Tabel pelaksanaan proyek Program Pengendalian Banjir, dapat di lihat 76 poin program pengendalian banjir masih dalam pengerjaan, hanya 5 poin yang pengerjaannya sudah masuki Drainase (Swakelola), Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana polder Gg. Indra, polder voorfo dan polder Air Hitam, Pembangunan Saluran Pengendalian banjir Jl. Antasari- Suryaata cs dan DAS Karang Asam Kecil, Pembangunan Saluran Pengendalian banjir Jl. Wahid Hasyim cs dan DAS Sempaja

### ***Pelaksanaan Evaluasi Program Pengendalian Banjir***

Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi secara reguler. Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti.

1. Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan :
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan peopang penanggulangan banjir.

Berdasarkan permasalahan yang di hadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isi-isu strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Belum efektif pemberdayaan SDM dibidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Tingginya moda transportasi yang tidak diimbangi dengan jaringan dan jembatan yang ada.
3. Meningkatkan jumlah titik banjir.
4. Belum dikendalikannya lahan pertanian sesuai pada RTRW
5. Belum maksimalnya pelayanan publik
6. Lambatnya upaya untuk perencanaan penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan dan persampahan Kota Samarinda.
7. Cakupan air bersih belum melayani seluruh kota.
8. Kurangnya dokumen penataan bangunan.
9. Belum optimalnya implementasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang.

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil”, dan “hasil” itu sendiri merupakan agregasi seluruh “keluaran” dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan tabel *Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda*, Program Pengendalian banjir berfokus pada pengurangan jumlah titik banjir di Kota Samarinda. Target pada tahun 2017 yaitu sebesar 48% jumlah titik banjir berkurang dengan anggaran sebesar Rp 418.256.245.000, dimana selama satu periode (2017-2021) direncanakan program yang berkelanjutan dengan proyeksi pengerjaan tahun jamak dengan penyempurnaan tiap tahunnya.

### ***Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong***

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda telah melaksanakan pembangunan di kelurahan Sidodadi, diharapkan dengan adanya pembangunan drainase dapat meminimalisir volume air yang diakibatkan oleh hujan dan dapat berdampak pada banjir di daerah tersebut, walaupun masih sering terjadi banjir di Kelurahan Sidodadi Samarinda Ulu dikarenakan saluran drainase tidak dapat menjalankan dengan baik sebagai penanggulangan banjir karena tersumbatnya saluran drainase dengan sampah ataupun lumpur, maka untuk itu perawatan yang dilakukan harus rutin dikerjakan dan ketika saluran drainase mengalami kerusakan atau ada komponen yang tidak berfungsi maka harus cepat diperbaiki, adapun dalam pembangunan telah dilaksanakan sesuai waktu dan untuk anggaran dalam perawatan sistem drainase telah dianggarkan setiap tahunnya. Kemudian masih kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang mengakibatkan kurang sempurnanya program yang dijalankan oleh pihak teknis di lapangan yang menjalankan adalah Dinas PUPR Kota Samarinda.

Dari beberapa hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dalam penerapan program penanggulangan banjir di daerah kelurahan sidodadi ada beberapa faktor seperti komitmen antara pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam sistem pendanaan untuk penyelesaian program penanggulangan banjir, tersedianya sumber daya manusia yang berkopeten, berkapasitas dalam bidangnya masing-

masing, tersedianya peralatan dan bahan baku yang mendukung terlaksananya program pengendalian banjir.

Untuk penghambat sendiri seperti terbatasnya anggaran yang di persiapkan sehingga dalam penyelesaian program tersebut membutuhkan waktu yang lama, masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan seperti masih sering masyarakat membuang sampah sembarangan.

Selain itu koordinasi pemerintah yang menjadi salah satu faktor penghambat juga karena kurangnya komunikasi yang bagus membuat pandangan antara masyarakat dengan pemerintah kota berbeda dalam segi penanggulangan banjir dan hal ini lah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa pemerintah kota tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian dari beberapa hasil wawancara di atas maka program penanggulangan banjir oleh Dinas PUPR Kota Samarinda masih belum maksimal di karenakan beberapa faktor sehingga program tidak berjalan 100%. Jika tidak segera di atasi atau di cari jalan keluarnya maka akan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap jalanya program penanggulangan banjir.

### ***Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengendalian Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda***

#### ***Faktor Pendukung***

Instansi Pemerintah Kota dalam hal ini sebagai pekerja teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda telah banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengendalian banjir yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dan Ketersediaan SDM dan peralatan yang memadai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu perpedoman pada peraturan yang berlaku serta melakukan sesuai dengan perencanaan strategi yang baik dan melalui prosuder administratif, hal tersebut di lakukan agar setiap produk kebijakan yang dibuat dapat diterapkan dengan efektif, efisien dan baik.

Dengan adanya faktor mendukung di harapkan dalam menerapkan program penanggulnagan banjir dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dari itu perlu adanya saling kerjasama, kordinasi, komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam memaksimalkan program penanggulangan banjir.

#### ***Faktor Penghambat***

Kendala yang di hadapi oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda terdapat pada realisasi anggaran. Lalu permasalahan yang lain nya seperti alih fungsi lahan yang tidak terkontrol lagi yang mengakibatkan tingginya sedimentasi pada saluran Drainase di Kota Samarinda. Serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan sekitar. lalu permasalahan Sosial pembebasan lahan di mana masyarakat banyak tinggal di atas aliran sungai

yang ada di Samarinda, mengenai kendala di lapangan berupa pembebasan lahan di karena pembebasan lahan ini bukan karena wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda mengalami kendala terhadap pembebasan lahan, karena pembebasan lahan bukan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda melainkan wewenang dari Pemerintah daerah.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam pengendalian banjir.
  - a. Program Pengendalian Banjir  
Dinas PUPR dalam melaksanakan Program Pengendalian banjir berdasarkan rencana strategis lima tahun yang akan datang dan yang bertanggung jawab dalam program pengendalian banjir adalah Pemerintah Kota Samarinda yang tupoksinya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda di Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (BPJSA).
  - b. Pelaksanaan Evaluasi Program Pengendalian Banjir  
Dinas PUPR melakukan evaluasi program pengendalian banjir dalam rangka memantau pelaksanaan program secara reguler. Evaluasi menjadi indikator sebuah keberhasilan sebuah perencanaan.  
Dinas PUPR juga dalam peranya menjalankan program pengendalian banjir di hambat oleh beberapa faktor yang di pengaruhi persoalan yang sedang berkembang di Kota Samarinda Seperti :  
Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan.  
Hilang ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah resapan dan penopang penanggulangan banjir yang dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa perkantoran serta fasilitas umum lainnya.  
Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pelaksanaan program pengendalian banjir.
  - c. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dalam program pembangunan saluran drainase yang ada di kelurahan sidodadi sudah berjalan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang menghambat program penanggulangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda keterbatasan

pendanaan yang mengakibatkan tidak sempurnanya program yang sedang berjalan hal tersebut adalah salah satu faktor penghambat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda terkait dalam program pengendalian banjir

### **Saran**

1. Untuk Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda dalam melaksanakan program pengendalian banjir agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya agar program yang dijalankan lebih berjalan optimal.
2. Bagi masyarakat, perlu diadakan sosialisasi atau pelatihan dalam menghadapi banjir guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya melakukan tindakan dalam upaya penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan setelah bencana sehingga resiko bencana dapat diminimalisir.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, agar tetap konsisten menjaga prinsip serta Visi dan Misi dalam hal pengendalian banjir dengan membuat rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dalam hal mengatasi permasalahan banjir di Kota Samarinda.
4. Menanggulangi banjir dapat dilakukan dengan cara memfungsikan sungai dan selokan sebagaimana mestinya, larangan membuat rumah di dekat sungai harus dipertegas agar tidak ada yang menghambat jalannya aliran air dan tidak merusak lingkungan dan terpenting membuat aturan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di aliran sungai.

Harus lebih memperhatikan mengenai penerbitan izin pertambangan yang didasarkan pada ketentuan dengan memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang akan terjadi kedepannya.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Asdak, Chay. 2007. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasibuan, Melayu S.P 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu S.P 2005 *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi* Bumi Aksara Jakarta
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kodatie, Robert J. dan Sugiyanto. 2002. *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perpektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Makmur. 2009 *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama
- Miles, dkk. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA : Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Robert L. Mathis dan John H. Jakson 2002 *Manajemen sumber Daya Manusia ; Buku- Buku Alih Bahasa Salemba Empat* Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Askara
- Samadi, (2007). *Geografi 1. Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*. Penerbit Yudhistira, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju
- Siagian. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Tanika, Lisa dkk. 2016. *Fungsi Hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS): Pemahaman, Pemantauan, dan Evaluasi*. Bogor: World Agroforestry Centre.